

PERANCANGAN ULANG INTERIOR KANTOR UPTD PSDA WILAYAH SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG DENGAN PENDEKATAN *ACTIVITY BASED WORKING (ABW)*.

Haifa Agis Karmila¹, Doddy Friestya Asharsinyo² dan Niken Laksitarini³

^{1,2,3}Prodi S1 Desain Interior, Fakultas Industri Kreatif, Universitas Telkom, Jl. Telekomunikasi No. 1, Terusan
Buah Batu – Bojongsoang, Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat, 40257

skaagisss@student.telkomuniversity.ac.id, doddyfriestya@telkomuniversity.ac.id,
nikenoy@telkomuniversity.ac.id

Abstrak : Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya air yang mencakup kegiatan administratif, operasional, dan pengawasan. Namun, kondisi interior kantor eksisting belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kerja pegawai yang dinamis, adaptif, dan beragam. Permasalahan yang ditemukan meliputi tata ruang yang kurang efisien, sistem penyimpanan yang tidak terorganisir, pencahayaan yang kurang optimal, furnitur yang tidak memenuhi standar ergonomi, serta minimnya privasi dan kenyamanan visual. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya fokus, kenyamanan, dan produktivitas kerja pegawai. Selain itu, karakter pekerjaan pegawai yang tidak hanya bekerja di dalam kantor tetapi juga di lapangan menuntut ruang kerja yang fleksibel dan mampu mengakomodasi berbagai aktivitas. Oleh karena itu, perancangan ulang interior kantor dengan pendekatan Activity Based Working (ABW) menjadi solusi yang relevan. Pendekatan ABW menyediakan variasi ruang kerja berdasarkan jenis aktivitas, seperti ruang kerja fokus, kolaborasi, diskusi, dan dokumentasi. Penerapan konsep ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan ruang, mendukung mobilitas pegawai, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, efisien, dan nyaman sesuai dengan standar perkantoran pemerintahan.

Kata kunci: desain interior, kantor pemerintahan, Activity Based Working.

Abstract : *The Regional Technical Implementation Unit for Water Resources Management of the Cimanuk–Cisanggarung River Basin plays a strategic role in water resources management, encompassing administrative, operational, and supervisory activities. However, the existing office interior conditions have not fully supported the dynamic, adaptive, and diverse work requirements of employees. The*

identified issues include inefficient spatial layout, unorganized storage systems, inadequate lighting, furniture that does not meet ergonomic standards, as well as a lack of privacy and visual comfort. These conditions have negatively affected employees' focus, comfort, and work productivity. In addition, the nature of employees' duties, which involve not only office-based tasks but also field activities, requires a flexible workspace capable of accommodating various work activities. Therefore, redesigning the office interior using the Activity-Based Working (ABW) approach is considered a relevant solution. The ABW approach provides a variety of workspaces based on activity types, such as focus work, collaboration, discussion, and documentation. The implementation of this concept is expected to enhance spatial efficiency, support employee mobility, and create a more productive, efficient, and comfortable work environment in accordance with government office standards.

Keywords: Interior Design, government office, Activity Based Working.

PENDAHULUAN

Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi teknis operasional pada bidang tertentu. Unit ini bertanggung jawab langsung kepada perangkat daerah dan berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, UPTD memiliki kewenangan dalam pelayanan teknis yang meliputi kegiatan administrasi, operasional, dan pengawasan sesuai bidangnya. Pada konteks ini, UPTD PSDA Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung memiliki tugas dalam pengelolaan sumber daya air meliputi sungai, danau, waduk, irigasi, hingga pantai.

Dalam beberapa tahun terakhir, desain interior perkantoran pemerintahan mengalami perubahan signifikan. Tren global menunjukkan pergeseran dari ruang kerja yang kaku menuju ruang kerja yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berfokus pada kesejahteraan pegawai. Menurut penelitian Judijanto dkk. (2024), lingkungan kerja yang responsif terhadap kebutuhan pengguna berkontribusi pada produktivitas dan kenyamanan pegawai. Hal ini diperkuat oleh Brill dkk. (1984) yang menyatakan bahwa

faktor interior seperti tata letak, pencahayaan, kebisingan, kualitas udara, dan furnitur memiliki dampak langsung terhadap efektivitas komunikasi serta kinerja karyawan.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kantor pemerintahan masih menggunakan konsep interior lama yang cenderung monoton dan minim nilai estetika. Hal ini mengakibatkan ruang kerja terasa padat, kurang fleksibel, serta tidak mendukung kolaborasi antar pegawai. Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 mengenai sarana dan prasarana kantor pemerintahan, disebutkan bahwa tata ruang yang baik harus memenuhi prinsip estetika, kenyamanan, efisiensi, serta mendukung kelancaran tugas administrasi. Pada kasus UPTD PSDA WS Cimanuk Cisanggarung, beberapa standar tersebut belum terpenuhi, terutama terkait pemanfaatan ruang, sistem penyimpanan, dan kenyamanan visual.

Hasil observasi dan survei menunjukkan bahwa area kerja memiliki masalah berupa penyimpanan berkas yang tidak terorganisir, pencahayaan yang kurang optimal, dimensi furnitur yang tidak sesuai standar ergonomi, serta sirkulasi yang terhambat akibat penempatan barang yang tidak efektif. Pegawai juga menyampaikan bahwa area kerja individu kurang memberikan privasi dan kenyamanan karena jarak antar meja terlalu rapat. Hal ini berdampak pada rendahnya fokus kerja terutama saat pegawai melakukan tugas administratif.

Selain bekerja di kantor, pegawai UPTD PSDA juga sering melakukan pekerjaan lapangan seperti survei sungai, inspeksi irigasi, atau koordinasi antarinstansi. Jenis pekerjaan yang beragam membutuhkan ruang kerja yang adaptif, fleksibel, serta dapat menyesuaikan kebutuhan mobilitas pegawai. Kondisi ruang eksisting saat ini tidak memberi dukungan penuh terhadap kebutuhan tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dibutuhkan pendekatan desain yang dapat mengakomodasi aktivitas pegawai secara optimal. Salah satu pendekatan yang sesuai adalah Activity Based Working. Menurut Veldhoen (2014), ABW merupakan pendekatan desain lingkungan kerja yang menyediakan berbagai jenis ruang sesuai kebutuhan aktivitas seperti bekerja fokus, kolaborasi, diskusi cepat, maupun dokumentasi. Penelitian Gajihub (2024) juga menjelaskan bahwa ABW meningkatkan efektivitas penggunaan ruang sekaligus memberikan fleksibilitas bagi pegawai untuk memilih lingkungan kerja sesuai aktivitas. Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan perancangan ulang interior kantor UPTD PSDA WS Cimanuk Cisanggarung dapat menghasilkan ruang kerja yang lebih produktif, efisien, dan nyaman bagi seluruh pegawai.

METODE PENELITIAN

Metode perancangan digunakan sebagai langkah sistematis untuk memperoleh data, menganalisis permasalahan, serta merumuskan konsep desain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses perancangan pada proyek ini dilakukan melalui beberapa tahapan berikut.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memahami kondisi eksisting bangunan, karakteristik pengguna ruang, serta kebutuhan fungsional pada kantor UPTD PSDA WS Cimanuk Cisanggarung. Data diperoleh melalui:

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan secara langsung di lapangan melalui kegiatan berikut:

- Survei lapangan, mencakup observasi kondisi ruang kerja, pencahayaan, sirkulasi, serta tata letak furnitur.
- Wawancara pegawai, untuk mengetahui kebutuhan ruang, kendala saat bekerja, serta persepsi terhadap kenyamanan interior saat ini.
- Dokumentasi visual, berupa foto dan video ruangan untuk dianalisis kembali pada tahap perancangan.
- Pengukuran langsung, yang meliputi dimensi ruangan, furnitur, bukaan, dan elemen interior lainnya sebagai dasar penyusunan denah eksisting.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur untuk memperkuat landasan teori perancangan. Sumber yang digunakan di antaranya:

- Jurnal ilmiah terkait lingkungan kerja, ergonomi, produktivitas, dan konsep Activity Based Working.
- Buku standar desain seperti Neufert Architect's Data dan Human Dimension and Interior Space oleh Panero dan Zelnik.
- Peraturan dan standar pemerintah mengenai kantor pemerintahan, pencahayaan, keselamatan kerja, serta standar fasilitas pegawai.
- Referensi desain perkantoran modern yang relevan sebagai acuan pembandingan.

2. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada kondisi eksisting.

Analisis dilakukan dengan cara:

- Membandingkan kondisi aktual ruang dengan standar

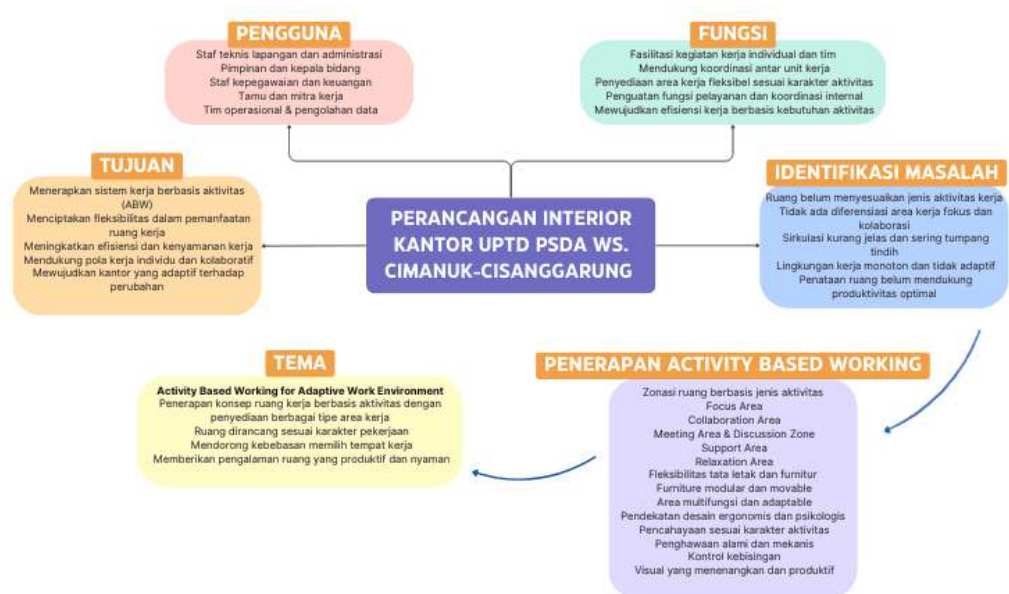
ergonomi, pencahayaan, dan tata ruang menurut literatur.

- Menelaah kesesuaian fungsi tiap ruang dengan aktivitas pengguna berdasarkan hasil wawancara.
- Menilai efektivitas zonasi, sirkulasi, serta hubungan antar divisi dalam mendukung alur kerja.

Hasil analisis ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebutuhan desain dan menyusun konsep perancangan.

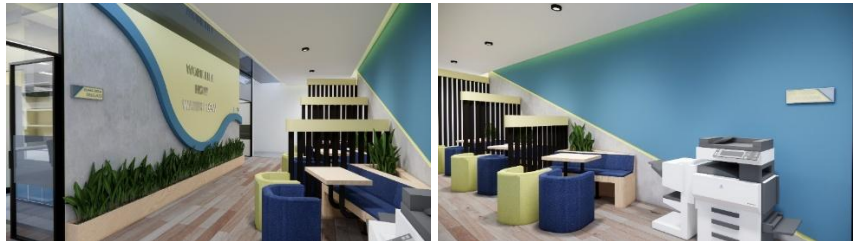
HASIL DAN DISKUSI

1.1 TEMA PERANCANGAN



Tema **Activity Based Working for Adaptive Work Environment** diterapkan melalui pembagian zona ruang berdasarkan jenis aktivitas, meliputi *focus area*, *collaboration area*, *meeting area*, *administrative area*, *support area*, dan *relax area*. Pembagian zona ini juga disusun

berdasarkan hierarki ruang, mulai dari zona publik, semi publik, hingga privat.



Gambar 1. 1 Perspektif Area Semi Publik – Ruang Diskusi dan Kolaborasi

Sumber : Dokumen Pribadi

Selain itu, pendekatan desain turut mempertimbangkan aspek kenyamanan visual dan psikologis pengguna. Kaplan dan Kaplan (1989) menyebutkan bahwa lingkungan dengan tingkat kompleksitas visual yang terkendali dapat meningkatkan kenyamanan dan mengurangi stres kerja. Oleh karena itu, penerapan elemen desain seperti pencahayaan alami, material bertekstur hangat, serta pemilihan warna yang tenang dan konsisten menjadi bagian penting dalam perancangan interior.



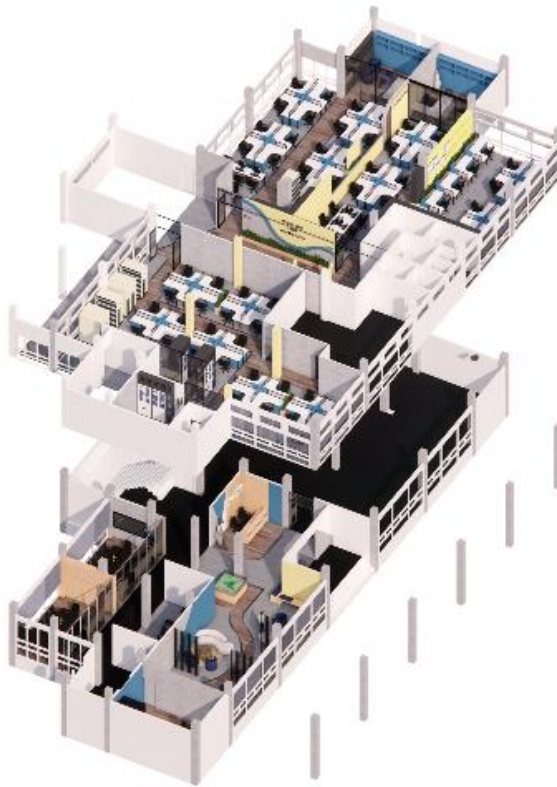
Gambar 1. 2 Perspektif Area Semi Publik / Relax Area sebagai Ruang Transisi

Sumber : Dokumen Pribadi

1.2 Konsep Implementasi Perancangan

Melalui penerapan tema ini, perancangan interior kantor diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai ruang kerja, tetapi juga sebagai lingkungan yang mendukung kesejahteraan pengguna. Dengan mengintegrasikan teori *Activity Based Working*, ergonomi, psikologi lingkungan, serta penerapan hierarki ruang, kantor UPTD PSDA WS Cimanuk–Cisanggarung diharapkan mampu menjadi ruang kerja yang produktif, adaptif, dan ber. Menurut Veldhoen (2011), *Activity Based Working* memberikan keleluasaan kepada pengguna untuk memilih lingkungan kerja yang paling sesuai dengan aktivitas yang sedang dilakukan. Dalam konteks perancangan ini, prinsip tersebut diterapkan dengan memberikan alternatif ruang kerja yang mampu mendukung aktivitas fokus individu, diskusi kelompok, koordinasi antar divisi, hingga aktivitas informal yang bersifat transisi. Becker dan Steele (1995) menegaskan bahwa lingkungan kerja yang responsif terhadap kebutuhan aktivitas pengguna dapat meningkatkan kinerja individu maupun kelompok, karena ruang mampu mendukung pola kerja yang dinamis dan kolaboratif. Asharsinyo dan Hanafiah (2018) menekankan bahwa ditinjau secara fisik maka desain ruang kerja merupakan salah satu faktor yang memungkinkan dapat terjadinya kenyamanan, dimana akhir-akhir ini yang banyak diminati adalah desain yang rancangan terbuka (*Open Plan*), berbeda dengan *Enclosed Space*.

Ruang kerja fokus dirancang dengan suasana yang lebih tenang dan ditempatkan pada zona privat untuk menjaga konsentrasi dan privasi pegawai. Sebaliknya, ruang diskusi dan kolaborasi ditempatkan pada zona semi publik sebagai ruang transisi antara area publik dan area kerja privat. Penempatan ini bertujuan untuk mengurangi gangguan terhadap aktivitas kerja fokus sekaligus tetap memfasilitasi kebutuhan koordinasi dan interaksi antarpegawai.



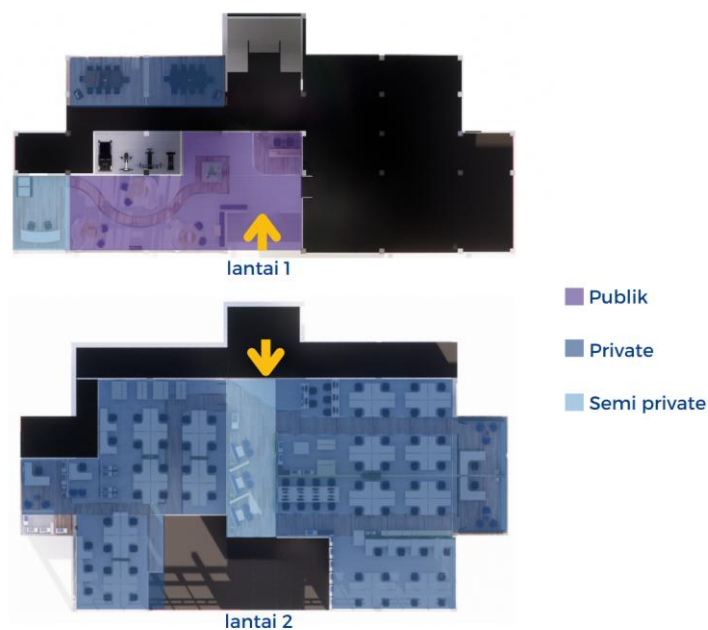
Gambar 4. 1 Skema Penerapan Activity Based Working pada Ruang Kerja

Sumber : Dokumen Pribadi

1.3 Konsep Hierarki Ruang dan Zonasi

Konsep hierarki ruang diterapkan sebagai strategi utama dalam implementasi perancangan interior kantor. Hierarki ruang berfungsi untuk mengatur hubungan antar ruang berdasarkan tingkat aksesibilitas, privasi, dan karakter aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Zona publik ditempatkan pada area yang mudah diakses oleh tamu dan masyarakat, berfungsi sebagai area penerimaan dan pelayanan awal. Zona semi publik berperan sebagai ruang transisi yang menampung aktivitas koordinasi, diskusi singkat, dan interaksi antarpegawai, sedangkan zona privat diperuntukkan bagi aktivitas kerja fokus dan ruang-ruang dengan kebutuhan privasi tinggi.

Ching (2014) menjelaskan bahwa hierarki ruang memiliki peran penting dalam membentuk keteraturan ruang dan mengarahkan pergerakan pengguna di dalam bangunan. Penerapan hierarki ruang yang jelas tidak hanya membantu pengguna memahami fungsi ruang secara intuitif, tetapi juga mampu mengurangi potensi gangguan antar aktivitas. Dalam perancangan ini, hierarki ruang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan zoning dan layout agar alur pergerakan tamu dan pegawai dapat terpisah dengan jelas dan tidak saling mengganggu.



Gambar 4. 2 Diagram Hierarki Ruang Publik–Semi Publik–Privat

Sumber : Dokumen Pribadi

1.4 Konsep Bentuk

Penerapan bentuk juga berperan penting dalam mendukung hierarki ruang. Pada zona publik dan semi publik, bentuk ruang dirancang lebih terbuka dengan elemen pembatas visual yang ringan,

seperti partisi semi transparan atau rak terbuka. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keterbukaan ruang, memudahkan interaksi, serta memberikan kesan ramah bagi tamu dan pengguna. Sebaliknya, pada zona privat, bentuk ruang dirancang lebih tertutup dan tegas untuk menciptakan suasana kerja yang fokus dan minim gangguan.

Partisi dan elemen pembatas ruang dirancang dengan pendekatan **semi transparan**, sehingga batas antar ruang tetap terbaca tanpa memutus kontinuitas visual secara penuh. Strategi ini sejalan dengan prinsip *Activity Based Working* yang menekankan fleksibilitas dan keterhubungan ruang. Menurut Ching (2014), penggunaan elemen pembatas non-masif dapat membantu mendefinisikan ruang sekaligus menjaga keterbukaan dan kelancaran sirkulasi.



Gambar 4. 3 Desain Partisi Semi Transparan sebagai Pembentuk Zona Ruang

Sumber : Dokumen Pribadi

Bentuk furnitur dirancang mengikuti prinsip ergonomi dan modularitas, dengan geometri sederhana yang mudah disusun ulang sesuai kebutuhan aktivitas. Meja kerja, rak penyimpanan, dan elemen pendukung lainnya dirancang dengan proporsi yang efisien agar tidak

membebani ruang secara visual. Pendekatan ini mendukung fleksibilitas tata ruang serta memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan kerja di masa mendatang. Selain itu, bentuk plafon dimanfaatkan sebagai elemen pembentuk karakter ruang dan penanda zona. Variasi ketinggian plafon, penggunaan elemen linear, serta komposisi bidang lengkung diterapkan untuk membedakan area kerja fokus, area diskusi, dan area semi publik. Elemen bentuk pada plafon juga berfungsi sebagai penunjang pencahayaan dan akustik, sehingga tidak hanya bersifat visual tetapi juga fungsional.



Gambar 4. 4 Desain Plafon sebagai Pembentuk Zona Ruang

Sumber : Dokumen Pribadi

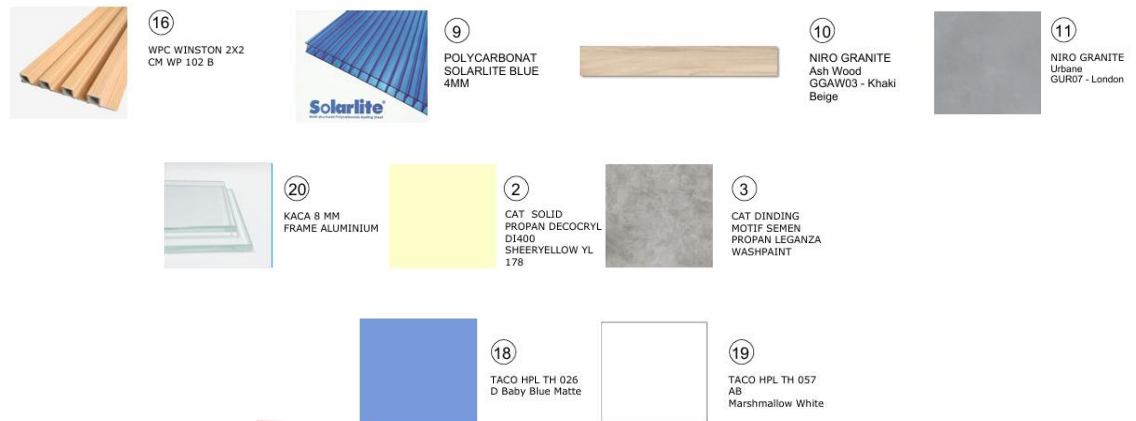
Secara keseluruhan, konsep bentuk dalam perancangan ini bertujuan untuk menciptakan interior kantor yang **sederhana, terstruktur, dan adaptif**, tanpa kehilangan identitas visual yang kuat. Melalui penerapan bentuk yang konsisten dan fungsional, interior kantor diharapkan mampu mendukung aktivitas kerja secara optimal, memperkuat hierarki ruang, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan profesional sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1.5 Konsep Material

Konsep material pada perancangan interior Kantor UPTD PSDA Wilayah Sungai Cimanuk–Cisanggarung disusun sebagai elemen pendukung utama dalam membentuk suasana ruang, mempertegas hierarki ruang, serta meningkatkan kenyamanan visual dan fungsional pengguna. Pemilihan material tidak hanya didasarkan pada pertimbangan estetika, tetapi juga pada aspek **ketahanan, kemudahan perawatan, keamanan, serta kesesuaian dengan karakter aktivitas kerja** yang berlangsung di setiap zona ruang.

Dalam konteks penerapan **Activity Based Working (ABW)**, material dipilih untuk mendukung fleksibilitas ruang dan kenyamanan kerja dalam jangka panjang. Material yang digunakan harus mampu beradaptasi dengan intensitas penggunaan yang tinggi, terutama pada area publik dan semi publik, serta tetap memberikan suasana yang tenang dan kondusif pada area kerja privat.

Menurut Pile (2003), material interior memiliki peran penting dalam membentuk persepsi ruang dan mempengaruhi pengalaman pengguna, baik secara visual maupun psikologis. Oleh karena itu, pemilihan material dalam perancangan ini dirancang secara terintegrasi dengan konsep bentuk, furnitur, dan organisasi ruang.



Gambar 4. 5 Material Interior Kantor pada Berbagai Zona Ruang

Sumber : Dokumen Pribadi

KESIMPULAN

Kantor yang berbasis pemerintahan seringkali dikaitkan dan memiliki citra yang monoton serta kurang diperhatikan dalam segi estetika maupun perhatian lebih terhadap alur aktivitasnya. Kantor UPTD PSDA sebagai obyek perancangan menjadi salah satu kasus tersebut. Dalam kondisi eksisting, obyek perancangan tersebut memiliki permasalahan yang umum dan khusus. Sistem penyimpanan yang belum terorganisir dengan baik, pemanfaatan ruang yang belum optimal, dimensi furnitur dan sirkulasi yang belum sesuai dengan standar dan tidak sesuai dengan kebutuhan aktivitasnya, serta belum adanya fasilitas penunjang berupa command center area yang pada dasarnya dimiliki setiap kantor PSDA.

Atas permasalahan dan fenomena yang telah disebutkan, disimpulkan bahwa perlunya interior kantor yang memadai dengan tujuan menjawab permasalahan. Pendekatan berupa *Activity Based-Working (ABW)* menjadi pilar utama dalam perancangan. Konsep-konsep yang ada dalam pendekatan tersebut diimplementasikan dengan pertimbangan serta penyesuaian kondisi lapangan dan karakteristik kantor pemerintahan.

Teori desain tersebut mengutamakan pegawai bekerja sesuai dengan aktivitas dan kebutuhannya. Implementasi desain dilakukan dengan mempertimbangkan hierarki ruang. Hierarki ruang berdasarkan dengan pembagian zonasi dan blocking setiap area. Dengan pertimbangan dan penyesuaian terhadap kondisi lapangan, zonasi dibagi menjadi 3 bagian yaitu publik, semi private, dan private. Zona publik meliputi area resepsionis dan ruang tamu yang diletakkan setelah pintu masuk utama pada lantai 1 bangunan yang dapat diakses oleh semua orang. Zona semi private meliputi command center area pada lantai 1 dan ruang kolaborasi pada lantai 2.

Ruang kolaborasi ini merupakan salah satu implementasi dari teori ABW yaitu dengan adanya ruang kerja yang bersifat santai dan komunikatif. Area ini dapat mengakomodasi disaat adanya kolaborasi antar pegawai atau dapat pula pegawai bekerja secara administratif pada area ini. Zona private meliputi area kerja serta ruang kepala setiap divisi.

Bagian ini menyimpulkan penelitian, dimulai dengan menuliskan kembali tujuan penelitian diikuti simpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan harus ringkas, tajam dan **fokus menjawab tujuan penelitian**. Sebuah kesimpulan dapat meninjau poin-poin utama dari artikel ini, namun tidak mereplikasi abstrak sebagai kesimpulannya. Tidak perlu ada uraian penjelasan pada bagian ini. Penjelasan ada di bagian HASIL DAN DISKUSI. Kesimpulan ditulis dalam paragraf, bukan berupa poin-poin atau penomoran (1,2,3,a,b,c).

Setelah itu, uraikan pula implikasi terhadap hasil riset (dampak keilmuan), limitasi atau kekurangan dari penelitian ini, serta berikan saran yang nyata dan spesifik untuk penelitian selanjutnya didasari dari limitasi/kekurangan penelitian ini. Semua poin di atas (tujuan, hasil, implikasi, limitasi, dan saran) harus ada dalam bagian kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA (Capital, Bold, 12pt, single spacing)

Brill, M., Weidemann, S., & BOSTI Associates. (1984). Disproving widespread myths about workplace design. New York: BOSTI.

Ching, F. D. K. (2014). Interior design illustrated. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Becker, F., & Steele, F. (1995). Workplace by Design : Mapping The High-Performance Workscape.

Judijanto, A., dkk. (2024). Lingkungan kerja responsif terhadap produktivitas pegawai. Jurnal Desain Interior, 12(1), 45–59.

Pile, J. (2003). Interior design (4th ed.). New York: Prentice Hall.

Veldhoen, E. (2014). The activity-based working practice guide. Amsterdam: Veldhoen + Company.

